

Judul : Hore, Guru Honorer Bakal Cepat Diangkat: UU ASN Disahkan
Tanggal : Jumat, 06 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

UU ASN Disahkan

Hore, Guru Honorer Bakal Cepat Diangkat

SENAYAN resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR, belum lama ini.

“Mudah-mudahan ada percepatan pengangkatan guru honorer,” ujar anggota Komisi X DPR Sodik Mudjahid.

Salah satu yang perlu diperhatikan setelah disahkannya UU ASN, menurut Sodik, yakni perihal kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut perlu didorong agar Pemerintah Pusat dapat memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah dalam pengangkatan honorer tersebut.

“Bagaimana mempercepat pengangkatan guru honorer ini karena undang-undangnya

sudah ada, tinggal dananya. Mudah-mudahan Pemerintah bisa relokasi (anggaran pada) bidang yang kurang prioritas dibandingkan pengangkatan guru,” jelasnya.

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, disahkannya UU ASN yang baru, merupakan dukungan DPR terhadap percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ASN menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan untuk rakyat.

“Pengembangan kompetensi ini bukan lagi sekadar hak bagi ASN, tapi kewajiban yang harus dipenuhi negara,” kata Puan, kemarin.

Menurut Puan, pola pengembangan kompetensi bagi ASN harusnya saat ini tidak lagi klasikal, seperti penataran. Tetapi



Sodik Mudjahid

mengutamakan *experiential learning*, seperti magang dan *on the job training*.

“Tentunya ini dapat mendukung terciptanya reformasi birokrasi yang baik di tubuh Pemerintah,” ujar Puan.

Dukungan DPR melalui

pengesahan UU ASN juga diperuntukkan bagi tenaga honorer, yang sedianya akan dihapuskan.

Puan menyebut, UU ASN memastikan adanya perlindungan bagi tenaga honorer dari bentuk PHK massal.

Bagi tenaga honorer, dia berharap UU ini menjadi angin segar dari kegelisahan mereka karena sempat ada wacana pemberhentian pada November ini.

“Undang-Undang ASN akan menjamin seluruh tenaga honorer untuk tidak di-PHK,” tuturnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, ada jutaan tenaga non ASN yang selama ini telah bekerja sungguh-sungguh mengabdikan untuk rakyat. UU ASN ini menjadi awal komitmen DPR untuk terus mendukung tenaga honorer, sehingga bisa terus bekerja bagi

negara.

“DPR dan Pemerintah sepakat, dalam Undang-Undang ASN ini jangan sampai ada penelantaran bagi tenaga honorer. Apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdikan, justru mereka ini yang diprioritaskan,” ucapnya.

Puan berharap, hadirnya UU ASN akan membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga ASN dan mendukung tenaga non ASN yang berperan besar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berpihak pada rakyat.

“Langkah bersejarah ini membawa harapan besar bagi tenaga non PNS di Indonesia,” pungkasnya. ■ KAL